

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU JAWA TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Sarjana Ekonomi



Oleh:

Wimpi Priambudi

NIM. 12812141018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU JAWA TAHUN 2013**

SKRIPSI

OLEH:
WIMPI PRIAMBUDI
12812141018

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 6 Juni 2016

Untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

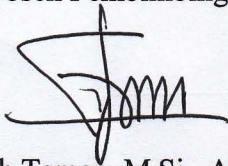
Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA
NIP. 19630624 199001 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2013

Disusun oleh:

WIMPI PRIAMBUDI

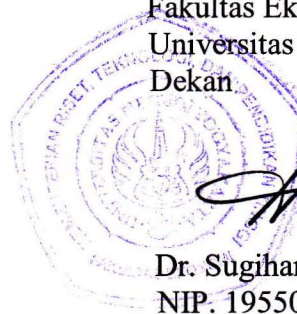
NIM 12812141018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Juni 2016

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji		27/06-2016
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA	Sekretaris Penguji		27/06-2016
M. Djazari, M.Pd.	Penguji Utama		27/06-2016

Yogyakarta, 28 Juni 2016
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 0024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wimpi Priambudi

NIM : 12812141018

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan

Kota di Pulau Jawa tahun 2013.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 27 Mei 2016
Penulis,



Wimpi Priambudi
12812141018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keajaiban terjadi bukan karena kamu melakukan berbagai ragam perbuatan baik. oh tidak! keajaiban justru terjadi karena kamu rela dan senang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut”. (Mother Theresa)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- Bapak Wardiman, Ibu Sri Patrustiningsih.
- Kakakku tersayang Eka Candra Wulandari,
dan Kakak Ipar Yoga Opera Nugroho.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI PULAU JAWA TAHUN 2013

Oleh:

WIMPI PRIAMBUDI
12812141018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. (3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013, diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2013 dengan pengecualian pada Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura dengan jumlah kabupaten dan kota yaitu 108. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862; koefisien determinasi (r^2_{1y}) 0,744; t_{hitung} 17,539 > t_{tabel} 1,98282. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610; koefisien determinasi (r^2_{2y}) 0,372; t_{hitung} 7,920 > t_{tabel} 1,98282. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912; koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) 0,832; F_{hitung} 260,766 > F_{tabel} 3,08.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

*THE IMPACTS OF LOCALLY-GENERATED REVENUE AND GENERAL
ALLOCATION GRANT TOWARD CAPITAL EXPENDITURE OF DISTRICTS
AND CITIES IN JAVA, IN 2013*

Created by:

WIMPI PRIAMBUDI
12812141018

ABSTRACT

The aims of this research are: (1) to know the impacts of Locally-Generated Revenue towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013. (2) To know the impacts of General Allocation Grant towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013. (3) To know the impacts of both Locally-Generated Revenue and General Allocation Grant altogether towards capital expenditure of districts and cities in Java, in 2013.

This is a causal comparative research. Where the data of Locally-Generated Revenue, General Allocation Grant, and Capital Expenditure were taken from Regional Government Budget realization of districts and cities in Java, in 2013 as retrieved from Directorate-General of Regional Fiscal Balance's official website. The population in this research covers all districts and cities in Java (2013), with Special Capital Region of Jakarta and Madura Island as exceptions, in which 108 districts and regions were covered. Documentation method was used in this research, with precondition test analysis were conducted through normality test, multicollinearity, and heteroscedasticity test. Also, hypothesis testing in this research used linear regression equation, and multiple linear regressions.

From the findings, it shows that: (1) Locally-Generated Revenue has a significant and positive effect in capital expenditure, depicted as 0,862 in coefficient correlation numbers (r_{1y}); and 0,744 in coefficient of determination (r^2_{1y}); $t_{counted} 17,539 > t_{table} 1,98282$. (2) General Allocation Grant has a significant and positive effect in capital expenditure, depicted as 0,610 in coefficient correlation numbers (r_{2y}); 0,372 in coefficient of determination (r^2_{2y}); $t_{counted} 7,920 > t_{table} 1,98282$. (3) Both Locally-Generated Revenue and General Allocation Grant have significant and positive effect altogether towards capital expenditure, as depicted as 0,912 in coefficient correlation numbers ($R_{1,2y}$); and 0,832 in coefficient of determination ($R^2_{1,2y}$); 0,832; $F_{counted} 260,766 > F_{table} 3,08$.

Keywords: Locally-Generated Revenue, General Allocation Grant, Capital Expenditure

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, dan limpahan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Abdullah Taman M.Si., Ak., Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Moh. Djazari, M.Pd., Narasumber yang selalu bersedia memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Jajaran Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi dan Prodi Akuntansi.
6. Teman-teman Akuntansi Kelas A 2012, atas kebersamaan dalam perkuliahan.
7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik secara material, teknis maupun spiritual, yang tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 27 Mei 2016
Penulis,



Wimpi Priambudi
12812141018

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Belanja Modal.....	8
a. Pengertian Belanja Modal.....	8
b. Peran Belanja Modal.....	9
c. Jenis-jenis Belanja Modal.....	10
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah.....	15
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
3. Dana Alokasi Umum.....	21
a. Pengertian Dana Alokasi Umum.....	21
b. Tahapan-tahapan Perhitungan DAU.....	23
c. Ketentuan Perhitungan DAU.....	24
B. Penelitian yang Relevan.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	30
D. Paradigma Penelitian.....	33
E. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35

	Halaman
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Populasi.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Data Umum.....	43
2. Data Khusus.....	45
3. Analisis Data.....	50
a. Uji Asumsi Klasik.....	50
b. Uji Hipotesis.....	54
1) Uji Regresi Linier Sederhana.....	54
2) Uji Regresi Linier Berganda.....	58
B. Pembahasan.....	60
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	60
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.....	61
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal.....	63
C. Keterbatasan Penelitian.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Komponen dan Jenis Belanja Modal.....	12
2.	Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten/kota.....	26
3.	Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota.....	26
4.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013..	46
5.	Statistik atas Pengolahan Data.....	48
6.	Hasil Uji dari <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	51
7.	Matriks Korelasi untuk Uji Multikolonieritas.....	52
8.	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Variabel Belanja Modal.....	54
9.	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Variabel Belanja Modal.....	56
10.	Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	33
2. Diagram Heterokedastisitas.....	53

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Analisis Regresi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan

konkretisasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002:67), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik, oleh sebab

itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal.

Berdasarkan permasalahan dari berbagai paragraf sebelumnya. Peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa pada periode tahun 2013. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka judul skripsi ini yaitu: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal dalam pendanaan Belanja Modal.
2. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, tentu diperlukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, maka pembatasan masalahnya yaitu:

1. Periode penelitian yaitu tahun 2013.

2. Penelitian ini berfokus pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah Daerah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu makna bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dari pendapatan daerah untuk Belanja Modal supaya kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju.

b. Untuk Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulisan karya ilmiah yang terkait dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teori

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim (2007:101)

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Mardiasmo (2002:67)

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya”.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk

memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

b. Peran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk

anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

c. Jenis-jenis Belanja Modal

Mengenai jenis-jenis Belanja modal dikategorikan menjadi 5 bagian, menurut Syaiful (2006):

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Daftar komponen biaya pada Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komponen dan Jenis Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4) Belanja Modal Pematangan Tanah 5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6) Belanja Modal Perjualan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
	Gedung dan Bangunan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan jembatan 6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan Jembatan 8) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan 9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
	dan Jaringan 11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan 12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 13) Belanja modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan 14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya 3) Belanja Modal sewa Peralatan Fisik Lainnya 4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengurusan Fisik Lainnya 5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya 6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2007:96)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132)

“PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dari berbagai pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan ganda, seperti halnya pajak pada umumnya yaitu:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:

- a) Pajak Provinsi
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Kota/Kabupaten
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan

(6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

(7) Pajak Parkir

Sistem pengenaan pajak:

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
- b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- c) Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2) Retribusi Daerah

Tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsinya terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini menganut asas manfaat (*benefit Principles*), dengan maksud besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima si pengguna yang membayar retribusi dan mendapat manfaat pelayanan dari pemerintah daerah, bilamana semakin efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang dibebankan.

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas 3 golongan yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum

Adapun yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan keberihan dan persampahan.
- (3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta catatan Sipil.
- (4) Pengujian kapal perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1) Pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan terminal.
- (3) Pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Tempat rekreasi dan olahraga.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin trayek.
- (4) Izin pengambilan hasil hutan.

3) Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan yang lain atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih, jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain daerah kabupaten atau kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah kabupaten atau kota di luar pajak, retribusi, dan laba BUMD. Berikut, beberapa contoh penerimaan yang termasuk ke dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

3. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dampaknya menyebabkan pemerintah daerah rendah dalam independensi mengelola keuangan daerah meskipun sebagian besar pengeluaran untuk rutin maupun pembangunan tersebut didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004)

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja pada daerah. Transfer dari pemerintah pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan wewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Umum termasuk sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer di tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran

manapun. Dana ini digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15, diterangkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Dana ini penting karena menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum pada daerah dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dana ini timbul karena konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi pada daerah. Dana tersebut juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horizontal tingkat daerah, serta pada kesenjangan pemerintahan bersifat vertikal antara pusat maupun daerah, demi terwujudnya stabilitas pada perekonomian di daerah dan negara.

b. Tahapan-tahapan Perhitungan DAU

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Berikut adalah tahapan-tahapan perhitungan DAU:

1) Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2) Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3) Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4) Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

c. **Ketentuan Perhitungan DAU**

- 1) DAU dialokasikan untuk:
 - a. Provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota
- 2) Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
- 3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

- 4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen).
- 5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

Tabel 2. Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk provinsi dan kabupaten/kota

Besarnya DAU	DAU untuk provinsi	DAU untuk kabupaten dan kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x APBN

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tabel 3. Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota

<p>Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah Fiskal + Alokasi Dasar</p> <p>Celah Fiskal suatu daerah = Selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal.</p> <p>Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Kebutuhan Fiskal = Hasil perkalian antara Total Belanja Daerah Rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita</p> <p>Kapasitas Fiskal = Hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.</p>
<p>Total Belanja Daerah Rata-rata</p> $= \frac{\text{Belanja pegawai} + \text{Belanja barang} + \text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah provinsi atau kabupaten dan kota}}$
<p>Indeks Jumlah Penduduk Daerah</p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk daerah}}{\text{Rata - rata jumlah penduduk secara nasional}}$
Indek Luas Wilayah Daerah

$= \frac{\text{Luas wilayah daerah}}{\text{Rata – rata luas wilayah secara nasional}}$
<p>Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah</p> $= \frac{\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah}}{\text{Rata – rata kemahalan konstruksi per nasional}}$
<p>Indeks Pembangunan Manusia Daerah</p> $= \frac{\text{IPM daerah}}{\text{Rata – rata IPM secara nasional}}$
<p>Indeks PDRB per Kapita Daerah</p> $= \frac{\text{PDRB per kapita daerah}}{\text{Rata – rata PDRB per kapita nasional}}$
<p>DAU atas dasar Celah Fiskal untuk Suatu Provinsi</p> <p>= Bobot Provinsi X DAU Provinsi</p> $\frac{\text{Celah fiskal suatu daerah provinsi}}{\text{Total celah fiskal seluruh provinsi}} = \text{Bobot Provinsi}$
<p>DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota</p> <p>= Bobot Kabupaten/Kota X DAU Kabupaten/Kota</p> $\frac{\text{Celah fiskal suatu daerah kabupaten/kota}}{\text{Total celah fiskal seluruh kabupaten/kota}} = \text{Bobot kabupaten/kota}$
<p>DAU suatu provinsi</p> <p>= DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu provinsi + Alokasi Dasar suatu provinsi</p>
<p>DAU suatu kabupaten/kota</p> <p>= DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota + Alokasi Dasar suatu kabupaten/kota</p>

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003)

Penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Hasil dari penelitian ini secara terpisah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) pada variabel terikatnya adalah Belanja Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian penulis variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003) yaitu terletak pada variabel bebasnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian oleh Saptaningsih Sumarmi (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih Sumarmi (2009) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Dana Alokasi Khusus serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Alokasi Belanja Modal Daerah, sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian Saptaningsih Sumarmi (2009) yaitu menggunakan variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Penelitian oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian

Anggaran Belanja Modal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu penggunaan variabel bebasnya Pertumbuhan Ekonomi, serta fokus variabel terikatnya yaitu pada Anggaran Belanja Modal, sedangkan fokus dari variabel terikatnya yang digunakan oleh penulis yaitu Belanja Modal. Kemudian, persamaan penelitian yang dibuat penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) yaitu pada variabel bebasnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat meningkatkan ketertarikan investor

untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimalkan mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi *public service* untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengalokasikan Belanja Modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum ini dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal. Dengan adanya Dana alokasi umum (DAU) ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal secara signifikan.

3. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

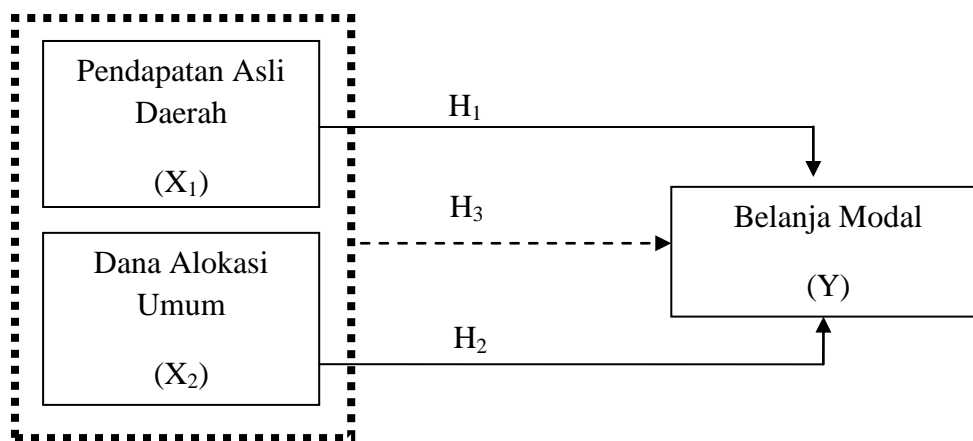
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan *Public Service* kepada masyarakat. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan *public*

service kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umum (DAU) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka berpikir, maka dapat digambarkan skema hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ada pada uraian kerangka berpikir, sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- X₁ = Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- X₂ = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU).
- Y = Variabel Dependen, Belanja Modal.

- ▶ = Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara sendiri-sendiri terhadap variabel Belanja Modal.
- ▶ = Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap variabel Belanja Modal.

E. Hipotesis

- H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
- H_2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.
- H_3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus, karena dari pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan dengan didasari permasalahan, lalu penyelesaiannya dilaksanakan melalui langkah yang sesuai dengan kajian metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh pemahaman dari jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, karena penelitian ini menelusuri tentang sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

a. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran dengan maksud untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penghitungan rumusnya yaitu:

**Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,
Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.**

2. Variabel Independen

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dengan sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer berbentuk dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dan bersumber dari pendapatan APBN. Pengalokasian DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan tingkat daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi maupun kabupaten/kota dihitung dengan acuan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan : Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013 dengan pengecualian pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura, sehingga jumlah populasi yang digunakan berjumlah 108 Kabupaten/Kota dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dokumen tersebut dipelajari dan dilanjutkan dengan proses pencatatan dan penghitungan terhadap data-data yang bersifat relevan pada permasalahan di penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian

ini diperoleh dengan cara mengunjungi situs resmi DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan berpatokan pada Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2013.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghazali, 2011: 160). Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0,05$ maka data normal dan jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0,05$ maka data tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghazali (2011: 105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

ortogonal. Kemudian, yang dimaksud dengan variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$) (Danang Sunyoto, 2007:89).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antar nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Regesi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2007:260) analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik

hubungan yang bersifat simetris, kausal dan *reciprocal*, sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di manipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007:261). Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X = PAD atau DAU

a = konstanta

b = koefisien regresi

Uji regresi linier sederhana menggunakan koefisien determinasi (r^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual terhadap variabel dependen,

yaitu Belanja Modal digunakan Uji t (*t-test*), hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%*.

b. Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2007:275) analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

e = *error*

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Imam Ghazali, 2011).

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Jumlah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa berjumlah 118 Kabupaten dan Kota. Pulau Jawa merupakan pulau dengan letak geografis yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara, Pulau Sumatra di sebelah barat, Pulau Bali di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan.

Rincian dari jumlah 118 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

Provinsi DKI Jakarta

1. Kab.Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kota Administrasi Jakarta Utara

Provinsi Banten

7. Kab. Lebak
8. Kab. Pandeglang
9. Kab. Serang
10. Kab. Tangerang
11. Kota Cilegon
12. Kota Tangerang
13. Kota Serang
14. Kota Tangerang Selatan

Provinsi DIY Yogyakarta

15. Kab. Bantul
16. Kab. Gunung Kidul
17. Kab. Kulon Progo
18. Kab. Sleman
19. Kota Yogyakarta

Provinsi Jawa Barat

20. Kab. Bandung
21. Kab. Bekasi
22. Kab. Bogor
23. Kab. Ciamis
24. Kab. Cianjur
25. Kab. Cirebon
26. Kab. Garut
27. Kab. Indramayu
28. Kab. Karawang
29. Kab. Kuningan
30. Kab. Majalengka
31. Kab. Purwakarta
32. Kab. Subang
33. Kab. Sukabumi
34. Kab. Sumedang
35. Kab. Tasikmalaya
36. Kota. Bandung
37. Kota. Bekasi
38. Kota. Bogor
39. Kota. Cirebon
40. Kota. Depok
41. Kota Sukabumi
42. Kota Tasikmalaya
43. Kota Cimahi
44. Kota Banjar
45. Kab. Bandung Barat

Provinsi Jawa Tengah

46. Kab. Banjarnegara
47. Kab. Banyumas
48. Kab. Batang
49. Kab. Blora
50. Kab. Boyolali
51. Kab. Brebes
52. Kab. Cilacap
53. Kab. Demak
54. Kab. Grobogan
55. Kab. Jepara
56. Kab. Karanganyar
57. Kab. Kebumen
58. Kota Salatiga
59. Kota Semarang
60. Kota Surakarta
61. Kota Tegal
62. Kab. Kendal
63. Kab. Klaten
64. Kab. Kudus
65. Kab. Magelang
66. Kab. Pati
67. Kab. Pekalongan
68. Kab. Pemasang
69. Kab. Purbalingga
70. Kab. Purworejo
71. Kab. Rembang
72. Kab. Semarang
73. Kab. Sragen
74. Kab. Sukoharjo
75. Kab. Tegal
76. Kab. Temanggung
77. Kab. Wonogiri
78. Kab. Wonosobo
79. Kota Magelang
80. Kota Pekalongan

Provinsi Jawa Timur

- 81. Kab. Bangkalan
- 82. Kab. Banyuwangi
- 83. Kab. Blitar
- 84. Kab. Bojonegoro
- 85. Kab. Bondowoso
- 86. Kab. Gresik
- 87. Kab. Jember
- 88. Kab. Jombang
- 89. Kab. Kediri
- 90. Kab. Lamongan
- 91. Kab. Lumajang
- 92. Kab. Madiun.
- 93. Kab. Magetan
- 94. Kab. Malang
- 95. Kab. Mojokerto
- 96. Kab. Nganjuk
- 97. Kab. Ngawi
- 98. Kab. Pacitan

- 99. Kab. Pamekasan
- 100. Kab. Pasuruan
- 101. Kab. Ponorogo
- 102. Kab. Probolinggo
- 103. Kab. Sampang
- 104. Kab. Sidoarjo
- 105. Kab. Situbondo
- 106. Kab. Sumenep
- 107. Kab. Trenggalek
- 108. Kab. Tuban
- 109. Kab. Tulungagung
- 110. Kota Blitar
- 111. Kota Kediri
- 112. Kota Madiun
- 113. Kota Malang
- 114. Kota Mojokerto
- 115. Kota Pasuruan
- 116. Kota Probolinggo
- 117. Kota Surabaya
- 118. Kota Batu

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 108, yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013 dan kecuali pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Madura yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian, Kabupaten dan Kota tersebut yang menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013.

2. Data Khusus

Pada penelitian ini terdapat tiga data yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh.

Deskripsi data yang di sajikan meliputi nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

Data khusus tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013 selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013

No	Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
1	Kab. Bandung	507.243.684.131	1.730.063.709.000	449.078.124.664
2	Kab. Bekasi	1.154.525.309.151	1.083.590.174.000	1.078.640.000.532
3	Kab. Bogor	1.261.034.564.121	1.887.770.112.500	1.316.781.706.310
4	Kab. Ciamis	117.475.935.245	1.303.907.527.000	391.395.028.710
5	Kab. Cianjur	266.100.616.612	1.305.617.257.000	309.901.421.702
6	Kab. Cirebon	250.848.893.157	1.280.797.128.000	323.561.695.993
7	Kab. Garut	240.631.630.078	1.563.833.157.000	692.368.428.641
8	Kab. Indramayu	174.713.400.274	1.134.695.113.000	234.540.001.656
9	Kab. Karawang	660.841.119.615	1.134.530.200.000	571.414.149.617
10	Kab. Kuningan	112.517.242.678	998.586.961.000	259.869.947.676
11	Kab. Majalengka	142.505.677.495	995.993.633.000	385.174.996.026
12	Kab. Purwakarta	173.764.159.823	722.162.721.000	231.762.332.172
13	Kab. Subang	143.314.398.091	1.032.567.532.000	291.168.432.035
14	Kab. Sukabumi	273.452.383.011	1.331.012.058.000	392.139.039.436
15	Kab. Sumedang	189.612.071.920	1.036.263.413.000	253.554.444.160
16	Kab. Tasikmalaya	70.474.192.115	1.225.934.879.000	488.363.197.158
17	Kota Bandung	1.442.775.238.323	1.485.941.032.000	1.064.845.440.308
18	Kota Bekasi	969.741.298.063	1.051.235.707.000	888.422.432.910
19	Kota Bogor	464.695.880.485	686.520.759.000	224.308.059.020
20	Kota Cirebon	206.019.069.726	536.884.996.000	169.462.451.965
21	Kota Depok	581.207.570.936	774.683.814.000	655.386.101.838
22	Kota Sukabumi	175.539.318.476	449.179.037.000	115.523.193.175
23	Kota Tasikmalaya	172.883.279.898	657.012.125.000	261.383.222.345
24	Kota Cimahi	191.599.456.904	489.174.792.000	120.732.964.467
25	Kota Banjar	70.625.135.392	317.122.023.000	221.351.044.402
26	Kab. Bandung Barat	187.170.467.143	909.359.898.000	318.589.528.729
27	Kab. Banjarnegara	98.975.318.350	763.426.566.000	175.918.010.287
28	Kab. Banyumas	308.349.434.319	1.127.939.938.000	313.188.975.057
29	Kab. Batang	143.502.571.339	641.663.630.000	148.222.973.774
30	Kab. Blora	95.192.786.972	753.830.036.000	260.455.399.862
31	Kab. Boyolali	160.752.449.651	871.685.981.000	249.111.725.695
32	Kab. Brebes	133.836.336.686	1.098.999.510.000	325.840.766.312
33	Kab. Cilacap	278.507.545.940	1.197.315.060.000	421.186.662.714
34	Kab. Demak	138.214.446.133	737.911.647.000	352.309.888.384
35	Kab. Grobogan	143.586.365.567	906.666.365.000	353.074.204.294
36	Kab. Jepara	133.778.055.195	814.380.324.000	158.798.848.275

No	Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
37.	Kab. Karanganyar	161.715.929.349	810.216.582.000	148.478.744.026
38.	Kab. Kebumen	131.481.736.502	1.021.871.180.000	286.958.914.202
39.	Kab. Kendal	136.029.702.522	788.134.078.000	155.398.900.968
40.	Kab. Klaten	115.441.420.053	1.066.318.427.000	186.883.543.096
41.	Kab. Kudus	144.995.092.035	719.406.935.000	132.972.459.152
42.	Kab. Magelang	173.253.651.914	899.528.369.000	108.603.624.493
43.	Kab. Pati	169.127.415.979	960.479.326.000	203.474.443.723
44.	Kab. Pekalongan	147.687.255.201	768.500.117.000	184.320.225.104
45.	Kab. Pemalang	136.362.281.618	931.426.998.000	249.976.019.799
46.	Kab. Purbalingga	122.858.738.938	719.185.020.000	112.767.369.781
47.	Kab. Purworejo	127.565.801.410	793.904.679.000	180.854.184.775
48.	Kab. Rembang	126.808.083.812	640.273.360.000	135.447.797.344
49.	Kab. Semarang	215.679.554.472	778.604.920.000	227.584.378.658
50.	Kab. Sragen	146.721.552.108	869.155.545.000	141.263.725.821
51.	Kab. Sukoharjo	192.971.720.442	763.462.900.000	209.691.364.140
52.	Kab. Tegal	156.244.859.788	957.576.304.000	215.975.068.911
53.	Kab. Temanggung	102.080.197.094	651.171.674.000	103.805.509.274
54.	Kab. Wonogiri	111.592.606.315	917.476.557.000	192.048.802.286
55.	Kab. Wonosobo	108.729.508.524	665.548.034.000	138.195.097.852
56.	Kota Magelang	107.739.838.961	385.859.241.000	142.588.509.967
57.	Kota Pekalongan	114.252.438.719	384.489.368.000	131.315.591.230
58.	Kota Salatiga	106.100.450.499	358.331.867.000	69.203.906.339
59.	Kota Semarang	925.919.310.506	1.054.002.569.000	591.011.412.262
60.	Kota Surakarta	298.400.846.632	659.647.382.000	244.975.523.723
61.	Kota Tegal	176.377.335.075	370.642.983.000	100.804.466.696
62.	Kab. Bantul	224.197.864.331	854.810.634.000	183.269.840.475
63.	Kab. Gunung Kidul	83.427.447.822	779.069.238.000	156.373.178.937
64.	Kab. Kulon Progo	959.91.512.851	594.978.790.000	123.313.526.117
65.	Kab. Sleman	449.270.304.865	891.589.912.000	206.859.865.136
66.	Kota Yogyakarta	383.052.140.421	597.212.209.000	167.079.742.204
67.	Kab. Banyuwangi	183.235.877.414	115.4495.171.000	404.860.203.009
68.	Kab. Blitar	115.670.863.817	944.297.542.000	330.813.083.801
69.	Kab. Bojonegoro	215.766.157.632	876.021.914.000	315.627.292.681
70.	Kab. Bondowoso	79.559.722.884	752.776.704.000	251.144.647.576
71.	Kab. Gresik	502.767.029.904	804.903.511.000	417.766.098.409
72.	Kab. Jember	308.376.581.786	1.417.603.982.000	478.577.397.312
73.	Kab. Jombang	185.091.678.240	920.097.938.000	216.972.911.919
74.	Kab. Kediri	203.212.445.367	1.056.481.076.000	292.282.260.615
75.	Kab. Lamongan	161.087.916.085	958.344.988.000	240.071.772.482
76.	Kab. Lumajang	112.406.824.133	828.524.528.000	163.055.838.729
77.	Kab. Madiun	83.428.636.445	734.152.390.000	185.514.724.351
78.	Kab. Magetan	87.859.707.871	761.637.391.000	131.065.762.797
79.	Kab. Malang	262.267.260.455	1.439.234.034.000	436.501.502.528
80.	Kab. Mojokerto	219.013.234.739	832.266.682.000	230.226.503.155
81.	Kab. Nganjuk	153.130.115.173	928.265.611.000	239.382.605.915
82.	Kab. Ngawi	85.636.138.389	896.052.870.000	189.236.101.556
83.	Kab. Pacitan	62.988.926.126	647.293.403.000	132.854.725.599
84.	Kab. Pasuruan	278.165.169.903	992.689.474.000	247.247.832.930
85.	Kab. Ponorogo	134.097.320.781	890.922.311.000	110.848.141.315
86.	Kab. Probolinggo	108.513.200.489	848.994.313.000	211.259.728.570
87.	Kab. Sidoarjo	858.433.670.218	1.104.580.340.000	518.682.837.520
88.	Kab. Situbondo	78.043.407.932	692.549.026.000	264.570.994.896
89.	Kab. Trenggalek	77.799.518.146	737.814.627.000	206.760.394.222

No	Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
90.	Kab. Tuban	227.120.525.358	849.399.312.000	267.152.793.943
91.	Kab. Tulungagung	174.981.706.538	996.300.694.000	153.095.137.771
92.	Kota Blitar	72.853.545.668	355.673.006.000	107.175.438.263
93.	Kota Kediri	144.562.729.327	562.943.089.000	124.498.555.620
94.	Kota Madiun	96.011.481.200	474.093.362.000	180.111.000.000
95.	Kota Malang	317.772.985.192	746.686.937.000	353.264.833.758
96.	Kota Mojokerto	74.944.029.537	354.452.407.000	67.646.320.365
97.	Kota Pasuruan	66.110.651.059	353.127.853.000	78.111.929.389
98.	Kota Probolinggo	78.355.777.788	414.534.284.000	68.161.679.883
99.	Kota Surabaya	2.791.580.050.710	1.160.025.693.000	1.281.394.616.149
100.	Kota Batu	59.544.940.728	374.362.261.000	155.842.580.700
101.	Kab. Lebak	136.180.145.486	901.740.477.000	357.008.796.915
102.	Kab. Pandeglang	80.584.075.435	988.536.476.000	268.779.412.269
103.	Kab. Serang	417.677.400.299	868.652.743.000	382.931.103.844
104.	Kab. Tangerang	1.218.576.390.249	1.115.364.627.000	1.131.499.743.316
105.	Kota Cilegon	291.943.585.049	461.398.284.000	206.273.890.562
106.	Kota Tangerang	815.733.560.156	829.387.856.000	791.843.745.373
107.	Kota Serang	65.376.087.425	513.769.007.000	154.020.391.011
108.	Kota Tangerang Selatan	728.965.301.483	536.177.454.000	609.465.387.660

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013, maka nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Statistik atas Pengolahan Data

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	108	59544940728	2791580050710	277254724762.86	364824015856.134
DAU	108	317122023000	1887770112500	858960737597.22	299627176459.941
Belanja Modal	108	67646320365	1316781706310	304193715698.80	246311956916.034
<i>Valid N (listwise)</i>	108				

Sumber: *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

a. Belanja Modal

Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 67.646.320.365 yang diperoleh dari Kota Mojokerto, dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.316.781.706.310 yang diperoleh dari Kabupaten Bogor. Nilai *mean* 304193715698,80 dan nilai standar deviasi 246311956916,034.

b. Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 59.544.940.728 diperoleh dari Kota Batu, dan nilai maksimalnya sebesar Rp 2.791.580.050.710 diperoleh dari Kota Surabaya. Nilai *mean* 277254724762,86, dan nilai standar deviasi 364824015856,134.

c. Dana Alokasi Umum

Melalui hasil dari tahap pemerosesan pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 108, variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp 317.122.023.000 yang

diperoleh dari Kota Banjar, dan nilai maksimalnya sebesar Rp 1.887.770.112.500 yang diperoleh dari Kabupaten Bogor. Nilai *mean* 858960737597,22, dan nilai standar deviasi 299627176459,941.

3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Pada penelitian ini, uji normalitasnya menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan jika signifikansinya kurang dari $\alpha = 0,05$ maka data tidak normal dan jika signifikansinya lebih dari $\alpha = 0,05$ maka data normal. Adapun uji normalitas dengan uji *one sample kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		108
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-0,0000559
	<i>Std. Deviation</i>	100834298418.48900000
	<i>Absolute</i>	0,123
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,123
	<i>Negative</i>	-0,075
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,279
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,076

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

Hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel 6 Nilai Kolmogorov-Smirnov 1,279 dengan probabilitas signifikansi 0,076 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Dikatakan terjadi multikolonieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60, dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas, lebih kecil atau sama dengan 0,60 (Danang Sunyoto, 2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel bebasnya. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut:

Tabel 7. Matriks Korelasi untuk Uji Multikolonieritas

<i>Model</i>		DAU	PAD
<i>Correlations</i>	DAU	1,000	-0,389
	PAD	-0,389	1,000
<i>Covariances</i>	DAU	0,001	0,000
	PAD	0,000	0,001

a. *Dependent Variable:* Belanja_Modal

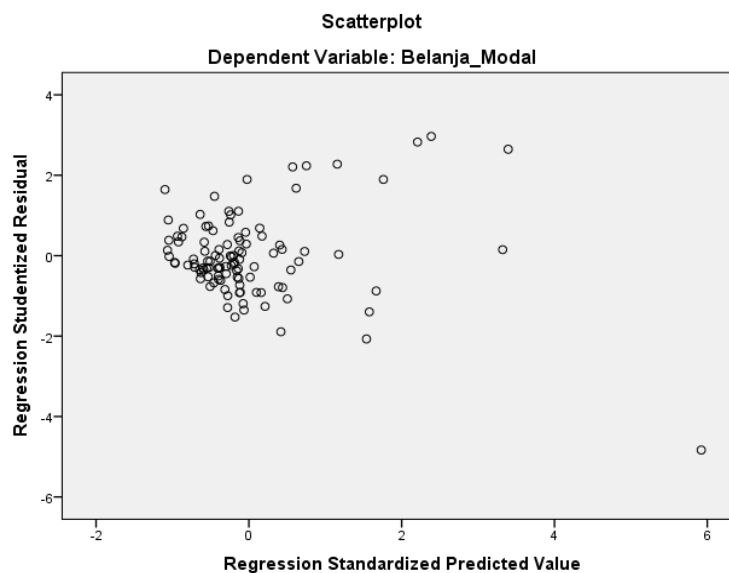
Sumber : *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat korelasi sebesar -0,389. Karena korelasi ini masih di bawah 0,60 atau 60%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Imam Ghazali, 2011). Maka pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini didasari oleh grafik *Scatterplot*. Berdasarkan

pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Heteroskedastisitas

Sumber : *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized* (Imam Ghozali, 2011).

Dari gambar 2 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu

Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

b. Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linier Sederhana

a) Uji Hipotesis Pertama

Melalui bantuan program IBM SPSS *Statistiscs Version* 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Variabel Belanja Modal

Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	R	R ²	t _{hitung}	Keterangan
Konstanta	142.762.755.823,1			9,413	
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0,582	0,862	0,744	17,539	Signifikan

Sumber: *Output* SPSS 20, data sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 8 di atas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 142.762.755.823,1 + 0,582X_1$$

Nilai konstanta sebesar 142.762.755.823,1 hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 142.762.755.823,1 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,582 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan

Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,582 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862. Koefisien determinasi (r^2_{1y}) sebesar 0,744 yang berarti 74,4% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 25,6% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai t_{hitung} 17,539 > t_{tabel} 1,98282 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan

“Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.

b) Uji Hipotesis Kedua

Melalui bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Variabel Belanja Modal

Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	R	R ²	t _{hitung}	Keterangan
Konstanta	-126.328.342.848			-2,195	
Dana Alokasi Umum (X ₂)	0,501	0,610	0,372	7,920	Signifikan

Sumber: *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 9 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = -126.328.342.848 + 0,501X_2$$

Nilai konstanta sebesar -126.328.342.848, dengan berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 126.328.342.848 jika Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,501, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,501 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610. Koefisien determinasi (r^2_{2y}) sebesar 0,372 yang berarti 37,2% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. Nilai $t_{hitung} 7,920 > t_{tabel} 1,98282$ menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum (DAU) maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal” dapat diterima.

2) Uji Regresi Linier Berganda

Melalui bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal

Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	R	R ²	F _{hitung}	Keterangan
Konstanta	-61.956.430.528	0,912	0,832	260,766	Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0,497				
Dana Alokasi Umum (X ₂)	0,266				

Sumber: *Output SPSS 20*, data sekunder yang diolah

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 10 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -61.956.430.258 + 0,497\text{PAD} + 0,266 \text{ DAU}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

- a) Konstanta sebesar -61.956.430.258 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar - 61.956.430.258.

b) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,497, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,497 atau 49,7%.

c) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar 0,266, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,266 atau 26,6%.

Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912, kemudian besarnya koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) adalah 0,832. Perhitungan hasil statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi perubahan variabel dependen sebesar 83,2%, sedangkan sisanya sebesar 16,8% ($100\% - 83,2\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui F_{tabel} sebesar 3,08 dan F_{hitung} sebesar 260,766, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan berarti secara simultan seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Maka disimpulkan hipotesis ketiga diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”, terbukti yaitu Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi (r^2_{1y}) sebesar 0,744 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 74,4%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 17,539 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,98282, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($17,539 > 1,98282$) yang berarti pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih

Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis satu (H_1) diterima.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”, terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610 menunjukkan hasil positif, dan koefisien determinasi (r^2_{2y}) sebesar 0,372 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 37,2%. Setelah dilakukan uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,920 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,98282, sehingga nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,920 > 1,98282$) yang

berarti pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kefas Caesar Pradata (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Transfer ini pengaruhnya cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat di kategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, dijelaskan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin

besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut, lalu pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan.

Hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan uji statistik F yang menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu variabel Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912 menunjukkan hasil positif dan koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) sebesar 0,832 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal sebesar 83,2%. Hasil pengujian statistik uji F berupa nilai F_{hitung} sebesar 260,766 dan F_{tabel} sebesar 3,08, sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($260,766 > 3,08$) yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kefas Caesar Pradata (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal. Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013” diterima.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Di Pulau Jawa tidak semua daerahnya berbentuk kabupaten atau kota, dan terdapat beberapa kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa tetapi masuk ke dalam salah satu provinsi di Pulau Jawa, sehingga penelitian ini

menjadi terbatas dan dilakukan pada daerah yang hanya berbentuk kabupaten atau kota yang berada di Pulau Jawa.

2. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode satu tahun yaitu tahun 2013.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862 dan koefisien determinasi (r^2_{1y}) sebesar 0,744. Nilai $t_{hitung} 17,539 > t_{tabel} 1,98282$.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610 dan koefisien determinasi (r^2_{2y}) sebesar 0,372. Nilai $t_{hitung} 7,920 > t_{tabel} 1,98282$.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{1,2y}$) sebesar 0,912 dan koefisien determinasi ($R^2_{1,2y}$) sebesar 0,832. Nilai $F_{hitung} 260,766 > F_{tabel} 3,08$.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten atau kota khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Allen, Richard & Tommasi, Dannel. (2001). *Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.
- Bambang Kesit Prakosa. (2004). “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Volume 8 No 2, 101-118.
- Danang Sunyoto. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta : Amara Books.
- Dini Arwati dan Novita Hadiati. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat”. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013)*.
- Kefas Caesar Pradata. (2015). “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Di Jawa Tengah Tahun 2011-2013”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kemenkeu DJPK. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Pada tanggal 10 Februari 2016
- _____. “Dana Alokasi Umum : Selayang Pandang”. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DAU.pdf>. Pada tanggal 13 Mei 2016
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Dana Perimbangan*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- _____. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saptaningsih Sumarmi. (2009). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta”.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :Penerbit Alfabeta
- Syaiful. (2006). “Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan”. Diambil dari <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>. Pada tanggal 9 Februari 2016.
- Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2003). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya

LAMPIRAN

Hasil Analisis Regresi

Rangkuman Data Khusus

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	108	59544940728	2791580050710	277254724762.86	364824015856.134
DAU	108	317122023000	1887770112500	858960737597.22	299627176459.941
Belanja_Modal	108	67646320365	1316781706310	304193715698.80	246311956916.034
Valid N (listwise)	108				

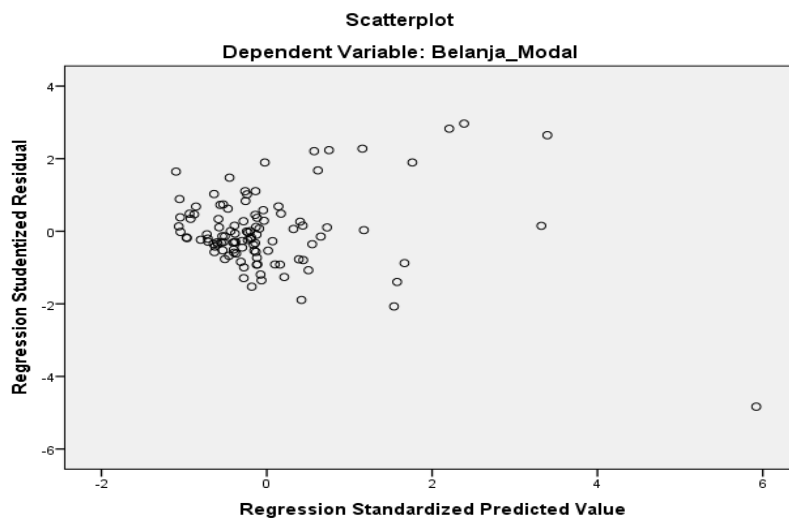
Uji Multikolonieritas

Coefficient Correlations^a

Model		DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1.000
		PAD	-.389
	Covariances	DAU	.001
		PAD	.001

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Uji Heteroskedastisitas



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000559
	Std. Deviation	100834298418.489000
	Absolute	.123
Most Extreme Differences	Positive	.123
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		1.279
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regresi Linier Sederhana (PAD)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.744	.741	125279124393.850

a. Predictors: (Constant), PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	142762755823.088	15167024313.803		9.413	.000
	PAD	.582	.033	.862	17.539	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Regresi Linier Sederhana (DAU)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.366	196153132277.501

a. Predictors: (Constant), DAU

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-126328342848.015	57545524365.708		-2.195	.030
	DAU	.501	.063	.610	7.920	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.829	101790095126.604

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.404E+24	2	2.702E+24	260.766	.000 ^b
	Residual	1.088E+24	105	1.036E+22		
	Total	6.492E+24	107			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.196E+10	30101624729		-2.058	.042
PAD	.497	.029	.737	16.989	.000
DAU	.266	.036	.323	7.454	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal